



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tata Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 20, Seri E Nomor 12) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Blora Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 21, Seri E Nomor 13) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2004 Nomor 16, Seri A Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2004 sebagai berikut :

| | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| a. Pendapatan..... | Rp. 371.605.615.015,- | |
| b. Belanja..... | Rp. 377.701.509.500,- | |
| Surplus / Defisit..... | | Rp. 6.095.894.485,- |
| c. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | Rp. 47.120.602.541,- | |
| b. Pengeluaran..... | Rp. 534.067.850,- | |
| Surplus / Defisit..... | | Rp. 46.586.534.691,- |

Pasal 2

(1). Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.953.621.015,- dengan
rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan..... | Rp. 357.651.994.000,- | |
| b. Realisasi..... | Rp. 371.605.615.015,- | |
| Sisa lebih / (kurang)..... | | Rp. 13.953.621.015,- |

(2). Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 25.123.287.708,- dengan
rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 402.824.797.208,- | |
| b. Realisasi..... | Rp. 377.701.509.500,- | |
| Sisa lebih / (kurang)..... | | Rp. 25.123.287.708,- |

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 39.076.908.723,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|------------------|
| a. Surplus / defisit setelah perubahan.....Rp. | 45.172.803.208,- |
| b. Realisasi.....Rp. | 6.095.894.485,- |
| Sisa lebih / (kurang).....Rp. | 39.076.908.723,- |

(4). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 1.413.731.483,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Setelah perubahan.....Rp. | 46.000.000.000,- |
| 2) Realisasi.....Rp. | 47.120.602.541,- |
| Sisa Lebih / (kurang).....Rp. | 1.120.602.541,- |

b. Pengeluaran

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) Setelah perubahan.....Rp. | 827.196.792,- |
| 2) Realisasi.....Rp. | 534.067.850,- |
| Sisa Lebih / (kurang).....Rp. | 293.128.942,- |

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------|
| a. Jumlah Aktiva.....Rp. | 2.208.463.603.579,- |
| b. Jumlah Utang.....Rp. | 70.657.957,- |
| c. Jumlah Utang Jangka PanjangRp. | 638.498.656,- |
| d. Jumlah Ekuitas Dana.....Rp. | 2.206.641.795.666,- |
| e. Jumlah Ekuitas Dana Donasi.....Rp. | 1.112.651.300,- |

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 40.490.640.206,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2003.....Rp. | 47.120.602.541,- |
| b. Jumlah Penerimaan Kas.....Rp. | <u>371.605.615.015,-</u> |
| | Rp. 418.726.217.556,- |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas.....Rp. | 378.235.577.350,- |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2004.....Rp. | 40.490.640.206,- |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

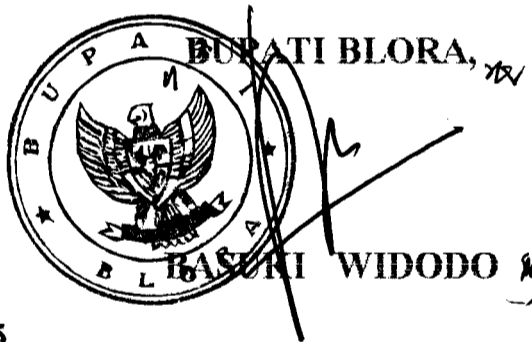
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal .16. September....2005



Diundangkan di Blora

pada tanggal .16. September. 2005 . . .



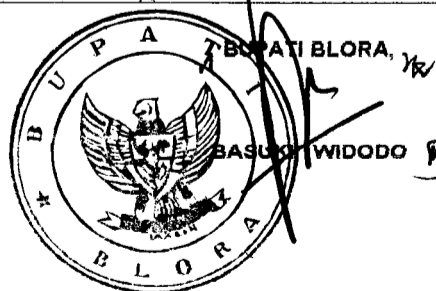
RAHARDJO RASYANTONO

RAHARDJO RASYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR .12..

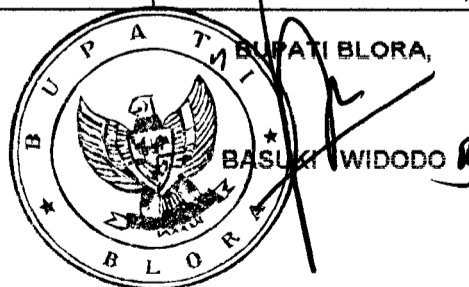
**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BLORA
 TAHUN ANGGARAN 2004**

| NO. REK. | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | PENDAPATAN | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | |
| 1.1.01 | Pajak Daerah | 4.364.131.829 |
| 1.1.02 | Retribusi Daerah | 13.007.045.653 |
| 1.1.03 | Bagian Laba Usaha daerah | 343.031.820 |
| 1.1.04 | Lain-lain Pendapatan asli Daerah | 11.816.253.460 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | |
| 1.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 27.006.497.879 |
| 1.2.02 | Dana alokasi Umum | 285.249.980.000 |
| 1.2.03 | Dana Alokasi Khusus | |
| 1.2.04 | Dana Perimbangan dari Propinsi | 12.004.827.120 |
| 1.3 | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 17.813.847.254 |
| | Jumlah Pendapatan | 371.605.615.015 |
| ii | BELANJA | |
| 2.1 | APARATUR DAERAH | |
| 2.1.1 | Belanja Administrasi Umum | |
| 2.1.1.1 | Belanja Pegawai / Personalia | 54.129.529.981 |
| 2.1.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.951.084.055 |
| 2.1.1.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.297.624.350 |
| 2.1.1.4 | Belanja Pemeliharaan | 2.738.654.367 |
| | Belanja Operasional dan Pemeliharaan | |
| 2.1.2 | Belanja Pegawai / Personalia | 4.197.744.390 |
| 2.1.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | 5.362.810.716 |
| 2.1.2.2 | Belanja Perjalanan Dinas | 851.613.450 |
| 2.1.2.3 | Belanja Pemeliharaan | 590.512.600 |
| 2.1.3 | Belanja Modal/Pembangunan | 3.358.090.250 |
| 2.2 | PELAYANAN PUBLIK | |
| 2.2.1 | Belanja Administrasi Umum | |
| 2.2.1.1 | Belanja Pegawai / Personalia | 138.974.071.489 |
| 2.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.145.395.803 |
| 2.2.1.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 539.604.000 |
| 2.2.1.4 | Belanja Pemeliharaan | 1.080.749.238 |
| | Belanja Operasional dan Pemeliharaan | |
| 2.2.2.1 | Belanja Pegawai / Personalia | 3.271.143.080 |
| 2.2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.788.511.676 |
| 2.2.2.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.564.312.100 |
| 2.2.2.4 | Belanja Pemeliharaan | 5.028.327.284 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 42.419.388.456 |
| 2.3 | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | 59.072.006.882 |
| 2.4 | Belanja Tidak Tersangka | 23.340.335.333 |
| | Jumlah Belanja | 377.701.509.500 |
| | SUPLUS/DEFISIT | (6.095.894.485) |
| iii | PEMBIAYAAN | |
| | Penerimaan Daerah | |
| 3.1.0.1 | Sisa Lebih Perhitungan Perhitungan Tahun Lalu | 47.120.602.541 |
| 3.1.0.2 | Transfer dari Dana Cadangan | |
| 3.1.0.3 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | |
| 3.1.0.4 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan | |
| | Jumlah Penerimaan Daerah | 47.120.602.541 |
| | Pengeluaran Daerah | |
| 3.2.0.1 | Transfer ke Dana Cadangan | |
| 3.2.0.2 | Penyertaan Modal | 360.000.000 |
| 3.2.0.3 | Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo | 174.067.850 |
| 3.2.0.4 | Sisa Lebih Perhitungan Angg Th Berkenaan | |
| | Jumlah Pengeluaran Daerah | 534.067.850 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | 46.586.534.691 |




**LAPORAN ALIRAN KAS
 TAHUN ANGGARAN 2004**

| NO. REK. | URAIAN | JUMLAH |
|-------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| 1.1 | Allran Kas Masuk : | |
| 1.1.01 | Pendapatan Asli Daerah | 29.530.462.762 |
| 1.1.02 | Pendapatan Dari Dana Perimbangan | 324.261.304.999 |
| 1.1.03 | Lain-lain dari Pendapatan Daerah Yang Sah | 17.813.847.254 |
| | JUMLAH | 371.605.615.015 |
| 2.1. | Belanja Administrasi Umum | |
| 2.1.1.1 | Belanja Pegawai / Personalia | 193.103.601.470 |
| 2.1.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.096.479.858 |
| 2.1.1.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.837.228.350 |
| 2.1.1.4 | Belanja Pemeliharaan | 3.819.403.605 |
| 2.2 | Belanja Operasional dan Pemeliharaan | 28.654.975.296 |
| 2.4 | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | 59.072.006.882 |
| 2.5 | Belanja Tidak Tersangka | 23.340.335.333 |
| | JUMLAH | 331.924.030.794 |
| | Allran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 39.681.584.221 |
| | ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| | Allran Kas Masuk : | |
| | Penjualan Investasi Jangka Panjang | - |
| | Penjualan Aktiva Tetap | - |
| | JUMLAH | - |
| 2.3 | Allran Kas Keluar : | |
| | Belanja Modal / Pembangunan | 45.777.478.706 |
| | Pembelian Investasi Jangka Panjang | - |
| | JUMLAH | 45.777.478.706 |
| | Allran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (45.777.478.706) |
| III | ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN | |
| 3.1 | Allran Kas Masuk : | |
| 3.1.01 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | - |
| 3.1.02 | Transfer dari Dana Cadangan | - |
| 3.1.03 | Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan | - |
| 3.1.04 | Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu | - |
| | JUMLAH | - |
| 3.2 | Allran Kas Keluar : | |
| 3.2.01 | Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi | 174.067.850 |
| 3.2.02 | Transfer dari Dana Cadangan | - |
| 3.2.03 | Penyertaan Modal | 360.000.000 |
| 3.2.04 | Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu | - |
| | JUMLAH | 534.067.850 |
| | Allran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | (534.067.850) |
| | Kenaikan (Penurunan) Kas Selama Periode 2004 | (6.629.962.335) |
| | Saldo Awal Kas | 47.120.602.541 |
| | Saldo Akhir Kas | 40.490.640.206,00 |


 BUPATI BIORA,
BASUKI WIDODO

NERACA DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2004

| AKTIVA | | PASIVA | |
|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| PERKIRAAN | SALDO | PERKIRAAN | SALDO |
| AKTIVA LANCAR | | UTANG JANGKA PENDEK | |
| Kas Daerah | 40.143.362.997 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 70.657.957 |
| UUDP / Kas Pk | 347.277.209 | Utang Belanja | |
| Surat Berharga | | Utang Pajak | |
| Deposito Berjangka | | Pendapatan Diterima Dimuka | |
| Piutang Pajak | 48.777.199 | Utang Lain-lain | |
| Piutang Retribusi | 2.681.680 | | |
| Piutang Dana Perimbangan | | | |
| Piutang Fasilitas Sosial / Fasilitas Umum | | | |
| Piutang Lain-lain | | | |
| Persediaan Bahan Pakai Habis/Material | | | |
| Belanja Dibayar Dimuka | | | |
| Piutang Dana Alokasi Umum | | | |
| Jumlah Aktiva Lancar | 40.542.099.085 | Jumlah Utang Lancar | 70.657.957 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | Utang Jangka Panjang | |
| Investasi dalam Saham | | Utang Dalam Negeri | |
| Investasi dalam Obligasi | | Utang Luar Negeri | 638.498.656 |
| Penyertaan Modal pada BUMD | 8.683.748.000 | | |
| Penyertaan Moda pada Non BUMD | 360.000.000 | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | 9.043.748.000 | Jumlah Utang Jangka Panjang | 638.498.656 |
| AKTIVA TETAP | | Ekuitas | |
| Tanah | 1.577.319.300.000 | Ekuitas dana Umum | 2.206.641.795.666 |
| Jalan dan Jembatan | 222.885.969.794 | Ekuitas Dana Dicadangkan | |
| Bangunan Air/Irigasi | 6.772.638.550 | Ekuitas Dana Donasi | 1.112.651.300 |
| Instalasi | 2.461.094.607 | | |
| Jaringan | 577.572.280 | | |
| Bangunan Gedung | 251.887.077.905 | | |
| Monumen/Tugu | 361.601.000 | | |
| Alat-alat Besar | 522.309.000 | | |
| Alat-alat Angkutan | 25.763.410.500 | | |
| Alat-alat Bengkel | 1.361.861.000 | | |
| Alat-alat Pertanian | 304.472.500 | | |
| Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 46.765.046.458 | | |
| Alat-alat Stodio dan Komunikasi | 2.854.519.000 | | |
| Alat-alat Kedokteran | 2.451.679.100 | | |
| Alat-alat Laboratorium | 2.828.491.800 | | |
| Buku Perpustakaan | 10.171.175.500 | | |
| Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan | 1.090.134.000 | | |
| Hewan Ternak dan Tanaman | 2.499.403.500 | | |
| Peralatan Keamanan | | | |
| Jumlah Aktiva Tetap | 2.158.877.756.494 | Jumlah Ekuitas | 2.207.754.446.966 |
| Dana Cadangan | - | | |
| Jumlah Dana Cadangan | - | | |
| Aktiva Lain-lain | | | |
| Piutang Angsuran | | | |
| Built Operate and Transfer (BOT) | | | |
| Bangunan dalam Penyelesaian | | | |
| Jumlah Aktiva Lain-lain | - | | |
| TOTAL AKTIVA | 2.208.463.603.579 | TOTAL UTANG DAN EKUITAS | 2.208.463.603.579 |


 BUPATI BLORA,
 BASUKI WIDODO